

PEMILIH CERDAS PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Analisis Atas Q.S. An Nisa Ayat 58)

Muhaemin
STAI Al Gazali Barru
muhaemin@stai-barru.ac.id

Irwan
STAI Al Gazali Barru
irwan@stai-barru.ac.id

Muh. Ilham Nur Haslin
STAI Al Gazali Barru
ilham@stai-barru.ac.id

Abstract

Elections are an important means of choosing leaders in a modern democratic system. Islam provides moral and ethical guidance regarding this process, as reflected in the QS. An-Nisa: 58 and hadith of the Prophet Muhammad SAW. This article analyzes relevant Islamic principles, such as trust, competence, justice, and obedience to Ulil Amri. Tafsir Mahmud An-Nasafi emphasizes that the mandate in QS. An-Nisa: 58 involves the responsibility to hand over leadership to those who are entitled, namely those who are competent. In addition, this article highlights the importance of participation in elections, the prohibition on abstention, and the dangers of choosing leaders without considering competence, which can lead to moral and religious losses. Political ethics, such as respecting differences in choices and maintaining post-election friendships, are also discussed. This article concludes that choosing leaders is the mandate of every Muslim to ensure just and competent leadership, in accordance with the values of the Koran and Sunnah

Keywords: Election, Leaders, Democratic System.

Abstrak

Pemilu merupakan sarana penting dalam memilih pemimpin dalam sistem demokrasi modern. Islam memberikan panduan moral dan etik terkait proses ini, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa: 58 dan hadits Nabi Muhammad SAW. Artikel ini menganalisis prinsip-prinsip Islam yang relevan, seperti amanah, kompetensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap Ulil Amri. Tafsir Mahmud An-Nasafi menekankan bahwa amanah dalam QS. An-Nisa: 58 melibatkan tanggung jawab menyerahkan kepemimpinan kepada yang berhak, yaitu yang kompeten. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya partisipasi dalam pemilu, larangan golput, dan bahaya memilih pemimpin tanpa mempertimbangkan kompetensi, yang dapat menimbulkan kerugian moral dan agama. Etika politik, seperti menghargai perbedaan pilihan dan menjaga silaturahmi pasca-pemilu, juga dibahas. Artikel ini menyimpulkan bahwa memilih pemimpin adalah amanah setiap Muslim untuk memastikan kepemimpinan yang adil dan kompeten, sesuai nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah.

Kata Kunci: Pemilu, Pemimpin, Sistem Demokrasi.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memegang kendali atas urusan mereka. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan isu yang mendapat perhatian besar karena keberadaan seorang pemimpin dianggap sangat vital untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan keberlangsungan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan seorang pemimpin yang mampu mengarahkan dan melindungi mereka dari ketidakadilan serta memastikan keberlangsungan sistem yang berlandaskan kebenaran dan keadilan.

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya amanah dalam memilih pemimpin yang kompeten, sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa: 58. Ayat ini menegaskan bahwa amanah kepemimpinan harus diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankannya. Tafsir Mahmud An-Nasafi memperjelas bahwa "al-amanah" dalam ayat tersebut mengacu pada kepemimpinan yang bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa memilih pemimpin bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban yang harus dilaksanakan secara bijak dan bertanggung jawab.¹

Hadits Nabi Muhammad SAW juga memperkuat pentingnya memilih pemimpin. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bahkan dalam kelompok kecil seperti perjalanan tiga orang, diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur dan mengambil keputusan.² Jika dalam konteks kecil saja diperlukan pemimpin, apalagi dalam konteks masyarakat yang lebih luas, seperti sebuah negara. Dengan demikian, memilih pemimpin bukan sekadar hak politik, tetapi amanah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial.

Sayangnya, di era modern ini, praktik golput atau tidak memilih masih menjadi tantangan serius. Beberapa individu menganggap pemilu sebagai aktivitas yang tidak relevan atau meragukan efektivitasnya. Namun, dalam perspektif Islam, tidak berpartisipasi dalam pemilu dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap amanah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan menyebutkan bahwa golput adalah haram karena mengabaikan tanggung jawab untuk memastikan hadirnya pemimpin yang adil dan amanah.

Selain pentingnya memilih, etika politik juga menjadi perhatian utama. Dalam realitasnya, perbedaan pilihan sering kali memicu konflik di tengah masyarakat. Padahal, Islam menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga silaturahmi. Pemilu seharusnya menjadi ajang untuk mempererat hubungan sosial, bukan menciptakan perpecahan. Oleh karena itu, etika dalam menghormati perbedaan pilihan dan menjaga keharmonisan pasca-pemilu perlu menjadi bagian dari kesadaran politik umat.

Kualitas kepemimpinan suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kualitas para pemilihnya. Sebagaimana kaidah yang mengatakan, "*Seperti apa keadaan kalian, demikian pula pemimpin yang akan diutus untuk kalian.*" Dalam konteks ini, menjadi pemilih cerdas yang bertanggung jawab

¹ Amiruddin Amiruddin, 'AMANAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)', *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11.4 (2021), 833 <<https://doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>>.

² A'ang Yusril Musyafa and Binti Maunah, 'Leadership Dalam Perspektif Islam', *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 3.2 (2022), 156–75 <<https://doi.org/10.55380/tarbawi.v3i2.246>>.

merupakan langkah awal dalam membangun pemerintahan yang adil, amanah, dan diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, pemilu bukan hanya persoalan politik, tetapi juga ibadah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

LITERATUR REVIEW

Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat, sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa: 58, yang menegaskan pentingnya menyerahkan amanah kepada mereka yang berhak. Tafsir Mahmud An-Nasafi menjelaskan bahwa amanah dalam ayat ini merujuk pada kepemimpinan, yang mensyaratkan adanya kompetensi dan keadilan pada calon pemimpin. Pemimpin ideal adalah mereka yang mampu menjaga hak-hak masyarakat dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai syariat dalam kehidupan bermasyarakat.³ Selain itu, QS. An-Nisa: 58 juga memerintahkan umat untuk taat kepada Ulil Amri (pemimpin), selama kepemimpinannya tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Pemilu Sebagai Mekanisme Pemilihan Pemimpin

Pemilu menjadi instrumen modern dalam memilih pemimpin. Meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur Islam klasik, pemilu relevan dengan prinsip Islam yang menekankan musyawarah dan keterwakilan. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi mendukung pemilu sebagai mekanisme islami yang sesuai dengan konteks zaman. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa berpartisipasi dalam pemilu adalah kewajiban, karena memilih pemimpin termasuk dalam kategori *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.⁴

Kriteria Pemimpin Ideal Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Dalam QS. An-Nisa: 58, Allah memerintahkan umat Islam untuk memberikan amanah kepada yang berhak, yaitu mereka yang memiliki kompetensi (*ahl al-nas*).⁵ Kompetensi ini mencakup keahlian dalam manajemen pemerintahan, integritas moral, dan kemampuan untuk menegakkan keadilan. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga keikhlasan dalam mengemban amanah. Dalam konteks ini, memilih pemimpin yang tidak kompeten tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah.

Golput dalam Perspektif Islam

Praktik golput (tidak memilih) mendapat perhatian serius dalam literatur keislaman modern. MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa golput adalah haram, karena berarti mengabaikan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin.⁶ Literatur Islam

³ Abd Mu'iz and Ibrahim Al-Khalil, 'PEMIMPIN IDEAL DALAM AL-QUR'AN (Analisis Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)', *El-Warqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 6.2 (2022), 232–59.

⁴ Iain Sultan and Amai Gorontalo, 'PEMIKIRAN POLITIK YUSUF AL-QARADHAWI Diskursus Tentang Hubungan Antara Agama Dan Negara Sampai Dengan Saat Ini Masih Menjadi Perdebatan Yang Cukup Signifikan Dalam Konteks Masyarakat Muslim Dan Dunia Islam . 1 Perdebatan Wacana Ini Tentunya Mencerminkan K', 21 (2024), 17–38.

⁵ Akhmad Mutawakkil Afifi, 'Penafsiran Makna Amanah Dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza Dalam QS. an-Nisa :58)' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

⁶ Hasanudin Muhammad, 'Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Masalah Mursalah', *Istinbath : Jurnal Hukum*, 16.1 (2019), 81–96 <<https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1552>>.

mengajarkan bahwa mengabaikan kewajiban memilih sama dengan membiarkan ketidakadilan terjadi. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, "Enam puluh tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin."⁷

Etika Berpolitik dalam Islam

Islam menekankan pentingnya menjaga etika dalam berpolitik, termasuk dalam konteks pemilu. Menghormati perbedaan pilihan merupakan salah satu prinsip utama dalam etika politik Islam. Hadits Nabi SAW menegaskan bahwa menjaga silaturahmi adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan, bahkan dalam kondisi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, setiap Muslim harus mengedepankan sikap toleransi dan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah meskipun berbeda dalam pandangan politik.

Pengaruh Kualitas Pemilih terhadap Kepemimpinan

Kaidah yang menyatakan "*Seperti apa keadaan kalian, demikian pula pemimpin yang akan diutus untuk kalian*" menekankan bahwa kualitas pemimpin sangat bergantung pada kualitas masyarakat. Literatur Islam mencatat bahwa masyarakat yang tidak cerdas dalam memilih pemimpin berpotensi mengalami kerusakan moral dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam sangat diperlukan untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilih cerdas merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan pemilu. Sayangnya, hal tersebut masih menjadi "pekerjaan rumah" terbesar pelaksana pemilu. Hal ini karena sebagian besar masyarakat masih menentukan pilihan bukan berdasarkan kompetensi dan kapabilitas peserta pemilu. Selain itu, mereka mengira pemilu tidak ada kaitannya dengan agama, sehingga dalam menentukan pilihan dilakukan secara asal-asalan. Padahal, jika ditelusuri secara mendalam pedoman utama umat Islam, yaitu Al-Qur'an, maka ditemukan didalamnya perintah Allah tentang pentingnya menjadi pemilih cerdas.

Sebutlah misalnya QS. An Nisa ayat 58. Di dalam ayat tersebut ditegaskan oleh Allah beberapa hal yang berkaitan dengan pemilih cerdas. Beberapa hal yang dimaksud adalah sebagai berikut;

Pertama, Setiap muslim harus memperdalam pemahamannya tentang urgensi pemilu, khususnya pemilukada.

Bahwasanya memilih pemimpin merupakan kewajiban bagi setiap muslim (yang memenuhi syarat). Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An Nisa ayat 58.

لِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ ...

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah..."

Menurut Mahmud An Nasafi dalam Tafsirnya, bahwa salah satu makna "*Al Amanati*" dalam ayat tersebut adalah jabatan politis alias kepemimpinan.⁸ Dengan demikian, makna potongan ayat

⁷ Isnen Azhar, 'Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyah (661-728H)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Kesilaman*, 18.1 (2019), 285–335 <<https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8759>>.

⁸ Azhar.

tersebut adalah "Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan (memberikan/menyerahkan) kepemimpinan..."

Dalam ayat selanjutnya, QS. An Nisa ayat 59, Allah menyebutkan perintah "taat kepada *Ulil Amri*". Dalam tafsir Ibnu Jarir at Tabari, yang dimaksud dengan *Ulil Amri* adalah "pemerintah".⁹ Dengan demikian, penyebutan pemerintah dalam ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah Swt. mengakui akan adanya dan pentingnya keberadaan "pemerintah alias pemimpin" dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Selain dalam Al-Qur'an, perintah memilih pemimpin juga ditemukan dalam hadits Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW:

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". (رواه ابو داوود)

Artinya:

Dari Abu Said, dari Abi Hurairah bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda "apabila ada tiga orang yang keluar untuk kepentingan safar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu dari ketiganya sebagai pemimpin". (HR. Abu Daud).

Jika untuk kebutuhan tiga orang saja mesti harus ada pemimpin, maka terlebih lagi jika lebih dari itu. Maka dari itu, tidak heran jika banyak ulama yang bersuara tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Beberapa diantara ulama yang dimaksud adalah: Syaikh Abdurrahman Al Jaziri. Beliau mengatakan, "Para imam mazhab yang empat (Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad) rahimahumullah, bahwa kaum muslimin itu harus mempunyai seorang Imam (untuk konteks saat ini, Imam yang dimaksud adalah Kepala Desa/Bupati/Wali Kota/Gubernur/Presiden) yang akan menegakkan syiar-syiar agama dan menolong orang yang dizalimi dari orang zalim".¹⁰

Imam Ibnu Hajar Al Haitami dalam *As Shawa'iqul Muhriqah* berkata, "Ketahuilah juga, bahwa para shahabat -semoga Allah meridhai mereka- telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (pemimpin) setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban paling penting ketika mereka menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan meninggalkan kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW."¹¹

Berdasarkan qaul Ibnu Hajar tersebut, dipahami bahwa, umat Islam pernah dipimpin oleh jasad tak bernyawa selama tiga hari, yaitu jasadnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa hal demikian sampai terjadi? Adalah karena urgennya keberadaan pemimpin, sedangkan saat itu terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat mengenai siapa yang layak menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat.

Bahkan, seorang tokoh yang banyak dipedomani pendapatnya oleh salafi-wahabi yang bernama Ibnu Taimiyah pernah berkata:

⁹ Kaizal Bay, 'Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim', *Jurnal Ushuluddin*, 17.1 (2011), 115–29 <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/686>>.

¹⁰ Arlis, 'MENGUNGKAP SYARAT KEPALA NEGARA : REFLEKSI TERHADAP KITAB AL- Fiqh " ALĀ AL - MAZĀHIB AL - ARBA " AH', *Moefly: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 12.2 (2023).

¹¹ Arlis.

ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان

Artinya:

"Enam Puluh Tahun dipimpin oleh orang dzalim itu jauh lebih baik daripada satu malam tanpa tanpa pemimpin".

Demikianlah betapa pentingnya keberadaan seorang pemimpin dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena "pemilu" merupakan metode pengangkatan pemimpin yang paling memungkinkan untuk diterapkan pada kondisi saat ini, sehingga dengan demikian wajib hukumnya setiap orang ikut memilih (baca; mencoblos). Sebaliknya, haram hukumnya golput, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kedua, setiap muslim wajib berijtihad dalam rangka menetapkan calon yang akan dipilih.

Berdasarkan lanjutan QS. An Nisa ayat 58 di atas, yaitu "إلى أهلها", yang bermakna "kepada yang berhak menerimanya", maka dipahami bahwa yang mesti diberikan amanah memimpin adalah "yang ahli dalam kepemimpinan". Atau dalam bahasa yang sedikit lebih keren, "yang memiliki kompetensi". Pada level ini dapat dipahami bahwa setiap pemilih mesti punya pemahaman tentang kategori pemimpin yang ahli, agar tidak salah dalam menentukan pilihan.

Lalu, bagaimana jika memilih pemimpin yang tidak kompeten? Maka pastinya akan melanggar sambungan ayat tersebut di atas, yaitu "... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ..." yang maknanya "... dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil...". Salah satu makna adil adalah "melakukan/memberikan sesuai proporsi".¹² Sehingga dengan demikian, yang menyerahkan kepemimpinan kepada yang tidak memiliki kompetensi berarti "dia tidak berlaku adil, alias menentang ayat suci Al-Qur'an".

Selain menentang ayat suci Al-Qur'an, orang yang memilih pemimpin bukan berdasarkan kompetensi (kemampuan/keahlian) yang dimiliki calon pemimpin, atau dalam bahasa yang lain, memilih pemimpin berdasarkan kepentingan dunia, maka dia akan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang membinasakan. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ... وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ...

Terjemahnya:

"Ada tiga golongan di akhirat kelak yang tidak dipandang oleh Allah, tidak pula disucikan dari dosanya, bahkan disiksa dengan siksaan yang pedih...(dintara ketiga golongan itu adalah seorang yang membaiat (memilih) pemimpin berdasarkan pertimbangan dunia..."

Yang mana contoh memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan dunia? Adalah seperti: memilih paslon tertentu karena dijanji akan diberi jabatan dan atau karena diberi uang atau benda tertentu (disogok). Ingatlah, pemberian kontestan pemilu sudah pasti sogokan. Tidak ada alasan sedikit pun untuk mengatakan pemberian mereka bukan sogokan. Mengapa? Karena momen mereka

¹² Agus romdlon Saputra, 'KONSEP KEADILAN MENURUT AL- QUR'AN DAN PARA FILOSOF Agus Romdlon Saputra *', *DIALOGIA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10.02 (2017), 185–99

memberi menjadi isyarat bahwa hal tersebut dilakukan karena keinginan dipilih. Sogokan sudah pasti haram. Harta haram pasti menghilangkan berkah. Dan yang terparah, menyebabkan mendapat siksaan diakhirat kelak.

Ketiga, saling menghargai pilihan masing-masing.

Berbeda dalam menentukan pilihan itu merupakan suatu hal yang sifatnya niscaya. Artinya, pasti terjadi. Mengapa? Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, janganlah seseorang memaksakan pilihannya untuk dipilih juga oleh orang lain. Yang mesti dilakukan adalah memaksimalkan usaha dalam hal mencari informasi tentang para paslon (Pasangan Calon) untuk digunakan menentukan siapa nantinya yang akan dipilih. Itulah makna potongan ayat selanjutnya, إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ, yang menginginkan agar setiap pemilih betul mencermati arahan Allah Swt. berupa maksimalisasi upaya mencari informasi untuk dijadikan bahan ijtihad dalam menentukan siapa yang paling ahli.

Adapun sekiranya ada yang tidak sanggup menetapkan pilihan, maka janganlah jadikan hal demikian sebagai alasan untuk tidak memilih. Lalu apa yang mesti dilakukan? Adalah bertanya kepada yang dianggap sebagai orang yang layak didengarkan pendapatnya.

Keempat, silaturahmi mesti dijaga (bahkan idealnya diperkuat).

Pemilu adalah pesta, sebagaimana telah diuraikan di atas. Maka dari itu, mestinya bukan kerenggangan hubungan yang terjadi pasca pesta dilakukan, melainkan keeratan atau penguatan hubungan. Jika ada yang ngotot memutus hubungan silaturahmi karena perbedaan pilihan, maka ingatlah selalu sabda Nabi SAW dibawah ini yang berbunyi:

لا يدخل الجنة قاطع الرحم

Artinya:

“Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi”.

Alangkah ruginya orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, hanya karena gara-gara perbedaan pilihan politik. Terlalu naif rasanya jika hal tersebut terjadi pada diri seorang muslim. Padahal dia sadar, bahwa: perbedaan pilihan itu hal yang wajar, memaksa itu perilaku tidak etis, dan memutus silaturahmi itu hal yang dibenci oleh agama.

Cermatilah ujung ayat di atas! Yaitu bahwa apa saja yang dilakukan oleh seseorang pasti dilihat oleh Allah Swt. Juga, apapun yang diucapkan oleh manusia pasti didengarkan oleh Allah Swt. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Dan ketahuilah! setiap yang dilakukan dan diucapkan oleh manusia, pasti dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat (QS. Al Isra ayat 36).

Terakhir, sebagai bahan renungan untuk penulis dan pembaca agar menjadi pemilih yang cerdas. Ada sebuah qaidah (pendapat lain mengatakan hadits) yang mengatakan bahwa:

كَمَا تَكُونُونَ يُؤَلَىٰ عَلَيْكُمْ

“seperti apa keadaan kalian (rakyat), maka begitulah keadaan pemimpin kalian.”

Qaidah tersebut, sesungguhnya, sesuai dengan firman Allah Swt. berikut:

وَكَذَلِكَ نُؤْتِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

“Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi penguasa bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.” (Al-An’am: 129)

Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa seorang khawarij pergi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, kemudian berkata, “Wahai Khalifah, mengapa pada masa pemerintahanmu engkau banyak dikritik oleh orang-orang yang tidak seperti orang-orang yang ada pada masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar dan Umar?”.

Ali bin Abi Thalib lalu menjawab, “Ini dikarenakan pada zaman Abu Bakar dan Umar yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang yang semisalku. Sedangkan rakyatku adalah engkau dan orang-orang yang semisalmu!

Ibnu al Qayyim al Jauziyah pernah berkata “seperti apa keadaan suatu kaum, seperti itupula pemimpin yang Allah Swt. utus padanya”. Artinya, jangan pernah berharap punya pemimpin yang berintegritas, jika belum bisa menjadi rakyat yang berintegritas pula. Selama masyarakat masih menerima pemberian kontestan pemilu, selama itupula korupsi merajalela.

KESIMPULAN

Memilih pemimpin merupakan kewajiban yang melekat pada setiap individu dalam sebuah masyarakat. Dalam Islam, kewajiban ini dilandasi oleh prinsip amanah yang tercermin dalam ajaran Al-Qur’an dan sunnah. Pemimpin yang dipilih haruslah memiliki kompetensi, keahlian, dan kemampuan untuk menjalankan amanah kepemimpinan secara adil dan bertanggung jawab. Bagi individu yang merasa tidak memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan secara mandiri, Islam menganjurkan untuk meminta pendapat dari orang-orang yang memiliki pemahaman lebih baik.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah meskipun terdapat perbedaan dalam pilihan politik. Perbedaan adalah hal yang wajar, namun persatuan dan kedamaian sosial harus tetap diutamakan. Kualitas kepemimpinan suatu bangsa erat kaitannya dengan kualitas masyarakatnya. Pemilih yang cerdas, yang memilih berdasarkan kompetensi dan integritas calon, akan membawa pemimpin yang adil dan amanah. Sebaliknya, memilih dengan dasar kepentingan duniawi dapat menimbulkan kerugian sosial dan moral. Oleh karena itu, tanggung jawab memilih pemimpin terbaik adalah langkah strategis menuju keberhasilan kolektif dan ridha Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, (2021). *Amanah Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)*, *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*.
- Musyafa, A’ang Yusril and Binti Maunah, (2022) *Leadership Dalam Perspektif Islam*, *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 3.2, 156–75

- Mu'iz, Abd. dan Ibrahim Al-Khalil, (2022). *PEMIMPIN IDEAL DALAM AL-QUR'AN (Analisis Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)*, *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*.
- IAIN Sultan Amai Gorontalo, '*PEMIKIRAN POLITIK YUSUF AL-QARADHAWI* Diskursus Tentang Hubungan Antara Agama Dan Negara Sampai Dengan Saat Ini Masih Menjadi Perdebatan Yang Cukup Signifikan Dalam Konteks Masyarakat Muslim Dan Dunia Islam
- Afifi, Akhmad Mutawakkil. (2020). *Penafsiran Makna Amanah Dalam Al-Qur'an (Aplikasi Teori Ma'na Cum Maghza Dalam QS. an-Nisa :58)*' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Muhammad, Hasanudin. (2019). *Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Masalah Mursalah*, *Istinbath : Jurnal Hukum*, 16.1